MAKALAH “BANDING”

**Nama Mahasiswa : Ila Gusmawati
Email : gusmawatiila@gmail.com
No BP : 1910003600475
Fakultas Hukum Universitas Ekasakti**

A. PENDAHULUAN

Upaya hukum merupakan hak dari pihak yang dikalahkan untuk tidak menerima putusan pengadilan, yang berupa perlawanan atau banding dalam hal menuntut cara yang diatur dalam Undang-Undang. Upaya hukum terhadap putusan pengadilan ialah usaha untuk mencari keadilan pada tingkat pengadilan yang lebih tinggi dari pengadilan yang menjatukan putusan tersebut.

Dalam upaya hukum itu terdapat upaya hukum biasa dan luar biasa. Salah satu upaya hukum yang biasa adalah banding. Oleh karena itu, dibuka kemungkinan bagi orang yang dikalahkan untuk mengajukan permohonan banding kepada pengadilan tinggi. Dengan diajukan permohonan banding perkara menjadi mentah lagi. Putusan pengadilan negeri, kecuali apabila dijatuhkan dengan ketentuan dapat dilaksanakan terlebih dahulu atau putusan provisionil, tidak dapat dilaksanakan. Berkas perkara yang bersangkutan, beserta salinan resmi putusan tersebut serta surat-surat yang lainnya, akan dikirim kepada Pengadilan Tinggi untuk diperiksa dan diputus lagi.

Banding merupakan salah satu upaya hukum yang dapat diajukan jika putusan pengadilan dirasa kurang memuaskan, sebagai seorang mahasiswa ilmu hukum tentulah kata “Banding” sudah tak asing lagi di telinga kita. Akan tetapi belum tentu semua mahasiswa mengetahui lebih jelas dan rinci seperti apa itu

Banding, maka selain untuk memenuhi tugas dari dosen pembuatan makalah ini juga memang ditujukan untuk memahami “Banding” secara lebih jelas. Selain untuk keperluan tambahan wawasan bagi mahasiswa ilmu hukum yang memang sedang mempelajari hukum positif Indonesia, pembuatan makalah ini juga diharapkan bisa bermanfaat bagi masyarakat umum. Kita ketahui bersama bahwa mayoritas masyarakat kita belum begitu memahami dengan hukum yang berlaku di negeri kita ini, mengingat banding sendiri memang sangat perlu untuk diketahui oleh masyarakat banyak.

B. PEMBAHASAN

Banding atau dalam Bahasa Belanda disebut appel adalah upaya hukum biasa yang pertama terhadap penetapan atau putusan pengadilan tingkat pertama untuk di ajukan atau dimohonkan pemeriksaan ulangan dipengadilan tingkat banding. Pemeriksaan perkara dalam pengadilan tingkat banding adalah pemeriksaan ulang secara keseluruhan. Dalam hukum, banding adalah salah satu jenis upaya hukum bagi terpidana atau jaksa penuntut umum untuk meminta pada pengadilan yang lebih tinggi agar melakukan pemeriksaan ulang atas putusan pengadilan negeri karena dianggap putusan tersebut jauh dari keadilan atau karena adanya kesalahan-kesalahan di dalam pengambilan keputusan. Upaya banding diberikan dengan tujuan untuk menjaga-jaga apabila hakim membuat kekeliruan atau kesalahan dalam mengambil keputusan.

Para pihak dalam perkara banding adalah pembanding atau yang mengajukan permohonan banding dan lawanya disebut terbanding. Dalam suatu perkara dapat dimungkinkan kedua pihak sama-sama mengajukan upaya

hukum banding karena sam-sama tidak puas akan putusan atau penetapan hakim maka yang menjadi masing-masing pihak dalam perkara ini adalah pembanding sekaligus terbanding.

1. Dasar Hukum Banding

Upaya hukum banding diadakan oleh pembuat undang-undang karena dikhawatirkan bahwa hakim yang adalah manusia biasa membuat kesalahan dalam menjatuhkan keputusan. Karena itu dibuka kemungkinan bagi orang yang dikalahkan untuk mengajukan permohonan banding kepada pengadilan tinggi.

Menurut ketentuan pasal 3 UU darurat No. 1 tahun 1951 peraturan hukum acara perdata untuk pemeriksaan ulangan atau banding pada pengadilan tinggi adalah peraturan-peraturan tinggi dalam daerah Republik Indonesia dahulu itu. Peraturan-peraturan yang digunakan dalam daerah RI dahulu adalah:

- a. Untuk pemeriksaan ulangan atau banding perkara perdata buat pengadilan tinggi di Jawa dan Madura adalah undang-undang No. 20 Tahun 1947.
- b. Untuk pemeriksaan ulangan atau banding perkara perdata buat pengadilan tinggi di luar Jawa dan Madura adalah *Rechtsterglement Voor Debuitengewesten* (RBG).

Syarat untuk dapat dimintakan banding bagi perkara yang telah diputus oleh pengadilan dapat dilihat dalam pasal 6 UU No.20/1947 yang menerangkan, apabila besarnya nilai gugat dari perkara yang telah diputus itu lebih dari Rp.100,- atau kurang. Oleh salah satu pihak dari pihak-pihak yang berkepentingan dapat diminta supaya pemeriksaan itu diulangi oleh pengadilan

tinggi yang berkuasa dalam daerah hukum masing-masing.

Dasar hukumnya adalah UU No 4/2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Pokok Kekuasaan dan UU No 20/1947 tentang Peradilan Ulangan. Permohonan banding harus diajukan kepada panitera Pengadilan Negeri yang menjatuhkan putusan (pasal 7 UU No 20/1947). Urutan banding menurut pasal 21 UU No 4/2004 jo. pasal 9 UU No 20/1947 mencabut ketentuan pasal 188-194 HIR, yaitu:

- a. Ada pernyataan ingin banding.
- b. Panitera membuat akta banding.
- c. Dicatat dalam register induk perkara.
- d. Pernyataan banding harus sudah diterima oleh terbanding paling lama 14 hari sesudah pernyataan banding tersebut dibuat.
- e. Pembanding dapat membuat memori banding, terbanding dapat mengajukan kontra memori banding.

2. Syarat-syarat dan Tata Cara Banding

- a. Syarat-syarat ataupun ketentuan-ketentuan banding

Upaya hukum banding diajukan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut sebagaimana diatur dalam pasal 188 sampai dengan 194 HIR dan UU No 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan.

- a) Diajukan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah dijatuhkan putusan atau menerima pemberitahuan putusan atau menerima pemberitahuan putusan perkara diperiksa

dengan tanpa biaya atau prodeo.

- b) Permohonan banding dapat diajukan dengan cara lisan maupun tertulis.
 - c) Permohonan banding dapat diajukan oleh yang bersangkutan atau diwakilkan dengan kuasa khusus untuk mengajukan banding.
 - d) Banding diajukan kepada Panitera pengadilan yang menjatuhkan putusan.
 - e) Permohonan banding harus disertai dengan membayar ongkos biaya perkara, permohonan banding yang tidak disertai membayar ongkos perkara tidak dapat diterima.
 - f) Terhadap putusan verstek tidak dapat diajukan upaya hukum banding.
 - g) Terhadap putusan dimintakan banding bersama-sama putusan akhir.
- b. Tata cara mengajukan banding

Dalam mengajukan banding terdapat tata cara yang harus dilakukan antara lain sebagai berikut:

- a) Setelah permohonan diajukan dan membayar biaya perkara, panitera mendaftarkan perkara dan membuat akta banding (pasal 10 ayat (1));
- b) Permohonan banding diberitahukan kepada pihak lawan (pasal 10 ayat(2));
- c) Panitera menyampaikan inzage kepada para pihak dengan

tujuan agar mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah menerima pemberitahuan inzage (pasal 11). Inzage merupakan hak para pihak boleh digunakan;

- d) Permohonan banding mengajukan memori banding kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama melalui Ketua Pengadilan Agama yang menjatuhkan putusan. Menyampaikan memori banding bukan merupakan kewajiban;
- e) Memori banding diberitahukan kepada pihak lawan untuk dipelajari dan membuat kontra memori banding untuk diserahkan kepada panitera pengadilan;
- f) Pengadilan menerima kontra memori banding dan memberitahukan kepada permohonan banding;
- g) Dalam 30 (tiga puluh) hari setelah permohonan banding seluruh berkas perkara di bendel dan dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama (pasal 11 ayat 2). dalam praktik pengiriman berkas ke Pengadilan Tinggi Agama lebih dari 30 (tiga puluh) hari;
- h) Permohonan banding dapat dicabut sewaktu-waktu sebelum putusan banding dijatuhkan.

3. Alasan dan Akibat serta Wewenang Banding

a. Alasan Permintaan Banding

Undang-undang tidak merinci alasan yang dapat dipergunakan terdakwa atau penuntut umum untuk mengajukan permintaan banding. Berbeda dengan permintaan kasasi, Pasal 253 ayat 1 merinci alasan yang dapat dikemukakan oleh pemohon kasasi. Atas landasan itu, alasan pokok permintaan pemeriksaan tingkat banding atas putusan pengadilan tingkat pertama pemohon tidak setuju dan keberatan atas putusan yang dijatuhkan dan alasan keberatan dan ketidaksetujuan atas putusan itu, dapat diinformasi atau dikemukakan sebagai berikut:

- a) Dapat dikemukakan pemohon secara umum;
- b) Dapat dikemukakan secara terperinci;
- c) Permintaan banding dapat ditujukan terhadap hal tertentu.

b. Akibat Permintaan Banding

Permintaan banding yang diajukan terhadap putusan pengadilan tingkat pertama, dapat menimbulkan beberapa akibat hukum yaitu;

- a) Putusan menjadi mentah kembali

Inilah akibat hukum yang pertama, permintaan banding mengakibatkan putusan menjadi mentah. Seolah-olah putusan

itu tidak mempunyai arti apa-apa lagi. Formal putusan itu tetap ada, tetapi nilai putusan itu lenyap dengan adanya permintaan banding.

- b) Segala sesuatu beralih menjadi tanggung jawab yuridis
Dengan adanya permintaan banding, segala sesuatu yang berhubungan dengan perkara tersebut beralih menjadi tanggung jawab yuridis. Pengadilan Tinggi sebagai pengadilan tingkat banding.
- c) Putusan yang didbanding tidak mempunyai daya eksekusi.
Akibat lain yang timbul karena permintaan banding, menyebabkan hilang eksekusi putusan, karena dengan adanya permintaan banding putusan menjadi mentah kembali.

c. Kewenangan Tingkat Banding

Bertitik tolak dari kedua landasan diatas, wewenang pengadilan tingkat banding memeriksa putusan pengadilan tingkat pertama sebagai berikut:

- a) Menjadi Seluruh Pemeriksaan dan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama
Pengadilan tingkat tinggi sebagai pengadilan tingkat banding dalam melaksanakan fungsi sebagai pengadilan tingkat banding.
- b) Berwenang Meninjau Segala Segi Pemeriksaan dan Putusan Oleh karena wewenang pemeriksaan tingkat

banding memeriksa ulang perkara secara keseluruhan dan dia berwenang meninjau dan menilai segala sesuatu yang berhubungan dengan pemeriksaan dan putusan.

c) **Memeriksa Ulang Perkara Secara Keseluruhan**

Seandainya pengajuan banding terhadap hal tertentu saja misalnya permintaan banding hanya ditujukan terhadap hukuman atau barang bukti saja, sama sekali tidak dapat menyampingkan wewenang pengadilan tingkat banding untuk memeriksa tingkat perkara secara keseluruhan.

4. Putusan yang dapat dan tidak dapat dibanding

Secara formal ada dua jenis upaya hukum yang dapat diajukan atau diperiksa oleh pengadilan tinggi sebagai instansi pengadilan tingkat banding. Hal ini perlu dijelaskan untuk mengetahui garis yang tegas antara dua upaya hukum tersebut. Dengan uraian singkat yang menginventarisin upaya perlawanan kiranya dapat memahami dan membedakan antara perlawanan dengan upaya banding.

1) **Putusan pengadilan tingkat pertama yang dapat dibanding**

Prinsip semua putusan akhir pengadilan dapat diajukan permintaan banding, akan tetapi pada prinsip ini ada pengecualian dan pengecualian itu di tgasikan dalam pasal 67.

2) **Putusan pengadilan tingkat pertama yang tak dapat dibanding**

a. **Putusan bebas atau vrijspraak**

- b. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau putusan Onslag van rechts vervolging
- c. Putusan acara cepat

3) Hubungan putusan bebas dengan banding dan kasasi

Putusan bebas yang diambilnya tidak dapat diuji oleh instansi manapun, apalagi dalam kondisi sekarang hal seperti ini merangsang para hakim tingkat pertama untuk bertindak menyalahgunakan wewenang, sebab sekali perkara itu diputus bebas, sudah final tidak dapat diuji serta diubah lagi.

4) Hubungan banding dan kasasi dengan putusan lepas dari segala tuntutan hukum

Masalah putusan lepas dari segala tuntutan hukum, tidak serumit permasalahan putusan bebas. Landasan ini melihat hubungan putusan lepas dari segala tuntutan hukum dengan permintaan banding dan kasasi adalah berdasar pasal 67 dan pasal 244 KUHAP

- a. Hubungan putusan lepas dari segala tuntutan hukum dengan banding
- b. Hubungan putusan lepas dari segala tuntutan hukum dengan kasasi

5. Tata Cara Penolakan Dan Penerimaan Banding

Permintaan banding yang diajukan ke Pengadilan Tinggi baik oleh terdakwa maupun penuntut umum dilakukan melalui “panitera” Pengadilan Negeri yang memutus perkara itu dalam tingkat pertama.

Panitera yang melayani permintaan banding. Sudah tentu, panitera meneliti segala persyaratan yang ditentukan undang-undang, karena ada kemungkinan permintaan yang diajukan tidak memenuhi syarat yang dibenarkan undang-undang. Terhadap permintaan banding yang tidak memenuhi syarat, panitera “dilarang” menerimanya. Ini ditegaskan dalam penjelasan Pasal 233 ayat (2). Sedangkan terhadap permintaan banding yang memenuhi persyaratan, panitera harus menerima dan melayani.

a. Penolakan Permintaan Banding

Sesuai dengan penjelasan Pasal 233 ayat (2), panitera “dilarang” menerima permintaan banding yang tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan undang-undang. Pengertian larangan, tidak lain dari pada “penolakan” atas permintaan banding tersebut. Syarat-syarat permintaan banding yang tidak sah serta tata cara penolakan banding yang tidak memenuhi syarat:

a) Permintaan Banding yang Tidak Memenuhi Syarat

Permintaan banding yang dianggap tidak memenuhi syarat undang-undang adalah:

1) Diajukan terhadap putusan yang tidak dapat dibanding.

Di ajukan terhadap putusan yang tidak dapat dibanding, merupakan permintaan yang “tidak sah” dan “tidak memenuhi persyaratan” undang-undang. Permintaan banding yang diajukan terhadap putusan yang tidak dapat dibanding, panitera “dilarang” menerimanya dan harus menolaknya. Tentang putusan pengadilan tingkat pertama yang tidak

dapat diperkenankan undang-undang untuk dimintakan banding:

- i. Putusan bebas,
- ii. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum, dan
- iii. Putusan acara cepat.

2) Permintaan banding diajukan setelah tenggang waktu yang ditentukan berakhir.

Faktor kedua yang bisa mengakibatkan permintaan banding tidak memenuhi syarat yang sah, apabila pengajuan permintaan dilakukan setelah “lewat tenggang” waktu yang ditentukan pada pasal 233 ayat (2). Berdasarkan ketentuan pasal 233 ayat (2), tenggang waktu mengajukan permintaan banding:

- i. Dalam waktu 7 hari sesudah dijatuhkan putusan, atau
- ii. Dalam waktu 7 hari setelah putusan diberitahukan kepada terdakwa yang tidak hadir pada saat putusan di jatuhkan.

b) Tata Cara Penolakan Banding

Tata cara penolakan permintaan dilakukan panitera sebagai berikut:

- 1) Panitera membuat “akta penolakan” permohonan banding.

Penolakan harus di tuangkan panitera dalam bentuk surat akta penolakan permohonan banding, tidak cukup

dilakukan dengan lisan;

- 2) Akta penolakan ditandatangani oleh panitera dan pemohon;
- 3) Serta dilakukan dan ditandatangani oleh Ketua Pengadilan Negeri;
- 4) Berkas perkara tidak dikirimkan ke Pengadilan Tinggi.

Dengan tata cara penolakan yang demikian ada buktinya, dan sekaligus memberi kepastian hukum tentang penolakan serta merupakan upaya pembinaan tata administratif peradilan yang lebih dapat dipertanggungjawabkan.

b. Penerimaan Permintaan Banding

a) Permohonan Banding Memenuhi Syarat

Mengenai hal ini dapat dipedomani ketentuan pasal 233 ayat (2) dan penjelasannya. Berpedoman kepada ketentuan tersebut, permohonan banding yang dianggap memenuhi syarat, tiada lain daripada kebalikan dari permohonan banding yang tidak memenuhi persyaratan, dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Permohonan diajukan atau disampaikan kepada panitera Pengadilan Negeri yang memutus perkara tersebut. Sekalipun permohonan banding diajukan ke Pengadilan Tinggi, namun permohonan dilakukan oleh pemohon “melalui” panitera Pengadilan Negeri yang memutus perkara,

tidak dapat langsung diajukan ke Pengadilan Tinggi.

2) Permohonan banding diajukan terhadap putusan yang dapat diminta banding. Tentang putusan perkara yang dapat diminta banding sudah dijelaskan yakni ditujukan terhadap putusan perkara:

- i. Putusan pemidanaan dalam perkara biasa dan singkat,
- ii. Putusan yang menyatakan dakwaan tidak dapat diterima dalam acara biasa dan acara singkat,
- iii. Putusan yang menyatakan dakwaan tidak dapat diterima dalam acara biasa dan acara singkat,
- iv. Putusan yang menyatakan dakwaan batal demi hukum dalam acara biasa dan acara singkat,
- v. Putusan perampasan kemerdekaan terdakwa dalam acara cepat,
- vi. Putusan Praperadilan mengenai tidak sah penghentian penyidikan dan penghentian penuntutan.

Terhadap putusan-putusan perkara yang demikian permintaan banding dapat diajukan. Sedang terhadap putusan bebas, lepas dari segala tuntutan hukum dan putusan acara cepat tidak diperkenankan mengajukan permintaan banding.

3) Permintaan diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan.

- i. Diajukan dalam waktu 7 hari sesudah putusan dijatuhkan bagi terdakwa yang hadir pada saat putusan dijauuhkan, atau
- ii. Dalam waktu 7 hari setelah putusan diberhentikan bagi terdakwa yang tidak hadir pada saat putusan dijatuhkan.

b) Tata Cara Penerimaan Permohonan Banding

Pada penerimaan permohonan banding diatur dan rinci pada pasal 233 ayat (3), (4), dan (5). Dari ketentuan pasal itu, lebih lanjut kita dapat menjabarkan tata cara penerimaan permohonan banding.

1) Permohonan langsung datang menghadap panitera

Permohonan banding langsung datang menghadap panitera Pengadilan Negeri yang bersangkutan dan mengajukan langsung permintaan banding baik “secara lisan” maupun dengan “tulisan”. Berdasarkan pasal 233 ayat (3), jika permintaan banding langsung dilakukan oleh pemohon dihadapan panitera, panitera wajib melaksanakan:

a) Membuat akta permintaan banding

Menurut pasal 233 ayat (3), akta permintaan banding disebut “surat keterangan permintaan banding”.

b) Akta permintaan banding “ditandatangani” oleh panitera dan pemohon.

Supaya akta permintaan banding dianggap sah harus ditandatangani baik oleh panitera maupun oleh pemohon banding.

- c) Tembusan akta permintaan banding diberikan kepada pemohon.

Akta permintaan banding dibuat dalam “beberapa rangkap” sesuai dengan kebutuhan, dan salah satu tembusannya “diberikan kepada pemohon” banding.

2) Permohonan banding diajukan tanpa menghadap

Menurut Pasal 233 ayat (4), permohonan banding dapat diajukan “tanpa menghadap langsung” panitera pengadilan. Hal ini memberi kemungkinan bagi pemohon untuk mengajukan permintaan banding “secara tertulis” atau “melalui telepon” atau “telegram”. Pemohon yang tidak dapat menghadap panitera, misalnya karena sakit maupun karena halangan lain. Panitera yang bersangkutan:

- a) Membuat akta permintaan banding
- b) Akta permintaan banding “cukup ditandatangani panitera.
- c) Panitera membuat “catatan tentang sebab dan alasan” pemohon tidak dapat menghadap.
- d) Kemudian akta yang berisi catatan itu “dilampirkan” dalam berkas.
- e) Juga catatan itu “ditulis dalam register” perkara pidana.

3) Yang berhak mengajukan permintaan banding Yang berhak mengajukan permohonan banding:

- a) Terdakwa, atau
- b) Orang yang khusus dikuasakan terdakwa, atau
- c) Penuntut umum, atau
- d) Terdakwa dengan penuntut umum sekaligus sama-sama mengajukan banding

c. Permintaan Banding Wajib Diberitahukan kepada Pihak Lain

Panitera wajib memberitahukan banding yang diajukan kepada pihak lain. Tujuannya agar pihak lain mengetahui tentang adanya permintaan banding serta kemungkinan mempersiapkan diri menyusun “kontra risalah” atau “kontra memori”. Berdasarkan Pasal 233 ayat (5):

- a. Apabila terdakwa mengajukan permintaan banding, panitera wajib memberitahukan kepada penuntut umum tentang permintaan banding terdakwa;
- b. Sebaliknya, permintaan banding yang diajukan penuntut umum wajib diberitahukan kepada terdakwa;
- c. Jika kedua belah pihak sekaligus mengajukan permintaan banding, hal itupun wajib diberitahukan panitera kepada masing-masing pihak secara silang.

Sifat pemberitahuan permintaan banding kepada pihak lain adalah “imperatif”. Oleh karena itu, pemberitahuan ikut menjadi salah satu

faktor yang menentukan tentang formalitas pemeriksaan permintaan banding. Selama permintaan banding belum diberitahukan secara sah kepada pihak lain, permintaan banding dianggap belum memenuhi formalitas. Selama permintaan banding belum diberitahukan secara sah kepada pihak yang lain, secara formal pengadilan tingkat banding tidak dapat memeriksa dalam tingkat banding.

d. Tenggang Waktu Berfikir

Secara garis besarnya, hak dan tenggang waktu berfikir dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Hak berfikir merupakan hak yang diberikan undang-undang kepada terdakwa dan penuntut umum. Baik terdakwa maupun penuntut umum dapat memepergunakan masa berpikir. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 169 ayat (3) huruf a dan angka 14 Lampiran Keputusan Menteri Kehakiman No. M.14-PW.07.03 Tahun 1983.
- Tujuan dan arti masa berpikir ialah dalam tenggang waktu tertentu terdakwa maupun penuntut umum diberi hak untuk berpikir apakah akan “menerima” atau “menolak” putusan.

a) Tenggang Waktu berpikir 7 hari

Tenggang waktu berfikir masih ada, selama tenggang waktu mengajukan permintaan banding masih ada. Tenggang waktu berpikir dengan sendirinya berakhir dan lenyap dengan berakhirnya tenggang waktu permintaan banding. Dari penjelasan tenggang waktu berfikir adalah sama dan persis

dengan tenggang waktu mengajukan banding, berikut:

- 1) Tenggang waktu berpikir terhitung 7 hari sejak putusan diajukan baik bagi penuntut umum dan terdakwa yang hadir pada saat putusan di jatuhkan.
 - 2) Sedang bagi terdakwa yang tidak hadir pada saat putusan dijatuhkan, tenggang waktu berpikir 7 hari sejak putusan diberitahukan dengan sah kepadanya.
- b) Selama Tenggang Waktu Berpikir Berhak Mencabut Pernyataan Disamping Pasal 196 ayat (3) huruf a memberi hak berpikir kepada
- terdakwa dan penuntut umum, Pasal 196 ayat (3) huruf e memberi “hak untuk mencabut” pernyataan yang telah disampaikan. Selama masa tenggang waktu berpikir, undang-undang memberi hak kepada terdakwa atau penuntut umum untuk mencabut kembali pernyataan penerimaan atau penolakan putusan.
- c) Eksekusi Putusan Dilaksanakan Sejak Berakhirnya Tenggang Waktu Berpikir

Sehubungan dengan definitifnya putusan terhitung sejak berakhir tenggang waktu berpikir yakni 7 hari sesudah putusan dijatuhkan bagi terdakwa yang hadir pada saat putusan dijatuhkan atau 7 hari sesudah putusan diberitahukan kepada terdakwa yang tidak hadir pada saat putusan dijatuhkan maka pelaksanaan eksekusi putusan dimulai pada saat setelah

tenggang waktu berpikir dilampaui.

d) Tidak Diajukan Permintaan Banding Selama Tenggang Waktu

Berpikir Terdakwa atau penuntut umum tidak mengajukan permintaan

banding dan tidak menyatakan menerima putusan. Selama tenggang waktu berpikir mereka bungkam tanpa satu pernyataan apapun, baik menerima atau menolak putusan. Apabila terjadi hal seperti ini, Pasal 234 telah memberi petunjuk sebagai penggarisan yang dapat disimpulkan sebagai berikut.

- 1) Yang bersangkutan “dianggap menerima putusan”
- 2) Panitera membuat “akta permintaan”
- 3) Akta permintaan “diletakkan dalam berkas perkara”

6. Putusan Tingkat Banding

Setelah membicarakan tata cara pemeriksaan pada tingkat banding, tiba saatnya melihat bentuk putusan yang dapat dijatuhkan Pengadilan Tinggi sebagai pengadilan tingkat banding, seperti diatur dalam pasal 241.

Berpedoman kepada ketentuan Pasal 241 ayat (1), diatur bentuk putusan yang dapat dijatuhkan Pengadilan Tinggi terhadap perkara yang diperiksanya dalam tingkat banding.

1) Memperkuat Putusan Pengadilan Negeri

Inilah bentuk pertama yang dapat dijatuhkan Pengadilan Tinggi dalam tingkat banding, “memperkuat” putusan yang telah dijatuhkan Pengadilan Negeri. Secara murni Pengadilan Tinggi

menguatkan putusan yang dijatuhkan Pengadilan Negeri. Tindakan yang semacam ini dapat dilakukan Pengadilan Tinggi apabila:

- Pemeriksaan yang dilakukan Pengadilan Negeri sepenuhnya dapat dibenarkan dan disetujui Pengadilan Tinggi. Tata cara proses pemeriksaan perkara disidang Pengadilan Negeri dinilai dan dianggap telah memenuhi tata tertib hukum acara yang berlaku.
- Penerapan hukum pembuktian telah sepatutnya dilakukan oleh Pengadilan Negeri.
- Demikian juga mengenai penilaian keadaan dan pembuktian seharusnya dilakukan oleh Pengadilan Negeri. Sesuai dengan sistem pembuktian dan asas batas minimum pembuktian, dianggap Pengadilan Tinggi sudah tepat menurut ketentuan undang-undang.
- Begitu juga argumentasi dan kesimpulan pertimbangan sudah tepat dilakukan oleh Pengadilan Negeri.
- Juga amar argumentasi yang dijatuhkan dapat disetujui oleh Pengadilan Tinggi.

Dalam hal apabila sepenuhnya sependapat dengan putusan yang dijatuhkan Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi berwenang untuk “menguatkan” putusan Pengadilan Negeri.

Sehubungan dengan wewenang Pengadilan Tinggi untuk menguatkan putusan yang dijatuhkan Pengadilan Negeri, terdapat beberapa variasi dalam cara mempergunakan

wewenang tersebut, antara lain:

a. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri “Secara Murni”.

Pada bentuk putusan yang menguatkan putusan yang dijatuhkan Pengadilan Negeri “secara murni”, Pengadilan Tinggi menganggap putusan itu sudah “tepat secara keseluruhan”. Tidak ada yang perlu lagi ditambah, diubah atau dikurangi.

b. Menguatkan Putusan “Dengan Tambahan Pertimbangan”.

Ini berarti pada prinsipnya Pengadilan Tinggi “sependapat” dengan putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri. Cuma ada hal-hal

yang kurang jelas dalam pertimbangannya, atau alasan yang digunakan perlu diperbaiki atau disempurnakan.

c. Menguatkan Putusan dengan Alasan Pertimbangan Lain.

Kalau ada variant kedua putusan Pengadilan Negeri dengan tambahan pertimbangan, pada variant yang ketiga, putusan Pengadilan Negeri dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi, “dengan alasan pertimbangan lain” dalam bentuk variabel ini:

- 1) Pada prinsipnya Pengadilan Tinggi setuju dengan amar putusan yang dijatuhkan,
- 2) Tapi sama sekali tidak setuju dan tidak sependapat dengan pertimbangan putusan Pengadilan Negeri.

2) Mengubah atau Memperbaiki Amar Putusan Pengadilan Negeri.

Mengenai bentuk putusan berupa perubahan atau perbaikan amar putusan Pengadilan Negeri, bisa jadi:

- Sepanjang mengenai pertimbangan dan alasan yang dimuat dalam putusan dapat disetujui dan dianggap tepat oleh Pengadilan Tinggi. Terhadap pertimbangan putusan Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi menganggapnya tepat. Namun, mengenai amar putusan, Pengadilan Tinggi tidak sependapat, sehingga amar putusan tersebut perlu diperbaiki.
- Atau baik pertimbangan putusan perlu ditambah, juga amar putusan Pengadilan Negeri perlu diubah atau diperbaiki. Pada kejadian seperti ini, disamping pertimbangan putusan ditambah oleh Pengadilan Tinggi, juga sekaligus mengubah atau memperbaiki amar putusan.
- Atau bisa juga, disamping Pengadilan Tinggi mengubah pertimbangan putusan Pengadilan Negeri dengan Pertimbangan lain, sekaligus perubahan pertimbangan itu diikuti perubahan atau perbaikan amar putusan.
- Atau sekaligus disamping mengubah atau memperbaiki amar putusan juga memutus perkara yang bersangkutan atas pertimbangan dan alasan lain.

Demikianlah beberapa variasi yang bisa terjadi dalam hal Pengadilan Tinggi mengubah atau memperbaiki amar putusan Pengadilan Negeri. Sedangkan mengenai hal yang diubah atau

diperbaiki bisa meliputi berbagai hal antara lain:

a. Perubahan atau Perbaikan Kualifikasi Tindak Pidana.

Perbaikan semacam ini terjadi apabila kualifikasi tindak pidana yang tercantum dalam amar putusan Pengadilan Negeri kurang tepat dan tidak sesuai dengan kualifikasi tindak pidana yang dirumuskan dalam pasal tindak pidana yang didakwakan

b. Perubahan atau Perbaikan Mengenai Barang Bukti.

Kemungkinan perbaikan mengenai barang bukti bisa terjadi dalam beberapa hal:

- 1) Lupa mencantumkan “pengembalian”,
“perusakan” atau “perampasan” barang bukti.
- 2) Salah meletakkan “status” barang bukti.

c. Perubahan atau Perbaikan Pemidanaan

Pada umumnya perubahan atau perbaikan putusan yang paling sering terjadi adalah menyangkut “pemeriksaan” atau hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa. Kadang-kadang Pengadilan Tinggi menilai pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa dianggap terlalu berat, dan pada kesempatan lain dianggap terlalu ringan.

3) Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri

Bentuk ketiga putusan Pengadilan Tinggi sebagai Pengadilan tingkat Banding, membatalkan putusan Pengadilan Negeri. Pengadilan Tinggi berwenang membatalkan dan juga berhak

mengoreksi putusan Pengadilan Negeri, bukan hanya menguatkan atau mengubah putusan, tetapi berwenang untuk “membatalkannya”.

C. KESIMPULAN

Dari seluruh uraian diatas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Banding merupakan upaya hukum biasa yang pertama terhadap penetapan atau putusan pengadilan tingkat pertama untuk di ajukan atau dimohonkan pemeriksaan ulangan dipengadilan tingkat banding. Pemeriksaan perkara dalam pengadilan tingkat banding adalah pemeriksaan ulang secara keseluruhan.
2. Adapun dasar hukum tentang banding adalah UU No 4/2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Pokok Kekuasaan dan UU No 20/1947 tentang Peradilan Ulangan. Permohonan banding harus diajukan kepada panitera Pengadilan Negeri yang menjatuhkan putusan (pasal 7 UU No 20/1947).
3. Adapun wewenang dari pengadilan tingkat banding adalah sebagai berikut:
 - a. Menjadi Seluruh Pemeriksaan dan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama
 - b. Berwenang Meninjau Segala Segi Pemeriksaan dan Putusan
 - c. Memeriksa Ulang Perkara Secara Keseluruhan
4. Putusan Yang Dapat Dan Tidak Dapat Dibanding
 - a. Putusan pengadilan tingkat pertama yang dapat dibanding
Putusan semua prinsip semua putusan akhir pengadilan dapat

diajukan permintaan banding, akan tetapi pada prinsip ini ada pengecualian dan pengecualian itu di tegaskan dalam pasal 67.

- b. Putusan pengadilan tingkat pertama yang tak dapat dibanding
 - a. Putusan bebas atau vrijspraak
 - b. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau putusan Onslag van rechts vervolging
 - c. Putusan acara cepat

5. Tata Cara Penolakan Dan Penerimaan Banding

Terhadap permintaan banding yang tidak memenuhi syarat, panitera “dilarang” menerimanya. Ini di tegaskan dalam penjelasan Pasal 233 ayat (2). Sedang terhadap permintaan banding yang memenuhi persyaratan, panitera harus menerima dan melayani.

6. Putusan pada Tingkat Banding dapat berupa
- a. Memperkuat Putusan Pengadilan Negeri
 - b. Mengubah atau Memperbaiki Amar Putusan Pengadilan Negeri
 - c. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri

DAFTAR PUSTAKA

- Darmini Roza dan Laurensius Arliman S Peran Pemerintah Daerah Di Dalam Melindungi Hak Anak Di Indonesia, *Masalah-Masalah Hukum*, Volume 47, Nomor 1, 2018.
- Laurensius Arliman S, *Komnas HAM dan Perlindungan Anak Pelaku Tindak Pidana*, Deepublish, Yogyakarta, 2015.
- Laurensius Arliman S, *Penguatan Perlindungan Anak Dari Tindakan Human Trafficking Di Daerah Perbatasan Indonesia*, *Jurnal Selat*, Volume 4, Nomor 1, 2016.
- Laurensius Arliman S, *Problematika Dan Solusi Pemenuhan Perlindungan Hak Anak Sebagai Tersangka Tindak Pidana Di Satlantas Polresta Pariaman*, *Justicia Islamica*, Volume 13, Nomor 2, 2016.
- Laurensius Arliman S, *Pelaksanaan Perlindungan Anak Yang Tereksplotasi Secara Ekonomi Oleh Pemerintah Kota Padang*, *Veritas et Justitia*, Volume 2, Nomor 1, 2016.
- Laurensius Arliman S, *Kedudukan Ketetapan MPR Dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia*, *Lex Jurnalica*, Volume 13, Nomor 3, 2016.
- Laurensius Arliman S, *Komnas Perempuan Sebagai State Auxiliary Bodies Dalam Penegakan HAM Perempuan Indonesia*, *Justicia Islamica*, Volume 14, Nomor 2, 2017.
- Laurensius Arliman S, *Peranan Pers Untuk Mewujudkan Perlindungan Anak Berkelanjutan Di Indonesia*, *Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai*, Volume 2, Nomor 2, 2017.
- Laurensius Arliman S, *Mewujudkan Penegakan Hukum Yang Baik Untuk Mewujudkan Indonesia Sebagai Negara Hukum*, *Jurnal Hukum Doctrinal*, Volume 2, Nomor 2, 2017.
- Laurensius Arliman S, *Participation Non-Governmental Organization In Protecting Child Rights In The Area Of Social Conflict*, *The 1st Ushuluddin and Islamic Thought International Conference (Usicon)*, Volume 1, 2017.
- Laurensius Arliman S, *Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Perundang-Undangan Untuk Mewujudkan Negara Kesejahteraan Indonesia*, *Jurnal Politik Pemerintahan Dharma Praja*, Volume 10, Nomor 1, 2017, <https://doi.org/10.33701/jppdp.v10i1.379>.
- Laurensius Arliman S, *Peran Komisi Perlindungan Anak Indonesia Untuk Mewujudkan*

Perlindungan Anak, Jurnal Respublica Volume 17, Nomor 2, 2018.

Laurensius Arliman S, *Menjerat Pelaku Penyuruh Pengrusakan Barang Milik Orang Lain Dengan Mempertimbangkan Asas Fungsi Sosial*, Jurnal Gagasan Hukum, Volume 1, Nomor 1, 2019.

Laurensius Arliman S, *Ilmu Perundang-Undangan Yang Baik Untuk Negara Indonesia*, Deepublish, Yogyakarta, 2019.

Laurensius Arliman S, Isdal Veri, Gustiwarni, Elfitrayenti, Ade Sakurawati, Yasri, *Pengaruh Karakteristik Individu, Perlindungan Hak Perempuan Terhadap Kualitas Pelayanan Komnas Perempuan Dengan Kompetensi Sumber Daya Manusia Sebagai Variabel Mediasi*, Jurnal Menara Ekonomi: Penelitian dan Kajian Ilmiah Bidang Ekonomi, Volume 6, Nomor 2, 2020.

Laurensius Arliman S, *Pendidikan Kewarganegaraan*, Deepublish, Yogyakarta, 2020.

Laurensius Arliman S, *Makna Keuangan Negara Dalam Pasal Pasal 23 E Undang-Undang Dasar 1945*, Jurnal Lex Librum, Volume 6, Nomor 2 Juni 2020, <http://dx.doi.org/10.46839/lljih.v6i2.151>.

Laurensius Arliman S, *Kedudukan Lembaga Negara Independen Di Indonesia Untuk Mencapai Tujuan Negara Hukum*, Kertha Semaya Journal Ilmu Hukum, Volume 8, Nomor 7, 2020.

Laurensius Arliman S, *Pelaksanaan Assesment Oleh Polres Kepulauan Mentawai Sebagai Bentuk Pelaksanaan Rehabilitasi Bagi Pecandu Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika*, Jurnal Muhakkamah, Volume 5, Nomor 1, 2020.

Laurensius Arliman S, Aswandi Aswandi, Firgi Nurdiansyah, Laxmy Defilah, Nova Sari Yudistia, Ni Putu Eka, Viona Putri, Zakia Zakia, Ernita Arief, *Prinsip, Mekanisme Dan Bentuk Pelayanan Informasi Kepada Publik Oleh Direktorat Jenderal Pajak*, Volume 17, No Nomor, 2020.

Larensius Arliman S, *Koordinasi PT. Pegadaian (Persero) Dengan Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumbar Dalam Penimbangan Barang Bukti Penyalahgunaan Narkotika*, UIR Law Review, Volume 4, Nomor 2, 2020, [https://doi.org/10.25299/uirlrev.2020.vol4\(1\).3779](https://doi.org/10.25299/uirlrev.2020.vol4(1).3779).

Laurensius Arliman S, *Tantangan Pendidikan Kewarganegaraan Pada Revolusi 4.0*, Ensiklopedia Sosial Review, Volume 2, Nomor 3, 2020.

Muhammad Afif dan Laurensius Arliman S, *Protection Of Children's Rights Of The Islamic And Constitutional Law Perspective Of The Republic Of Indonesia*, Proceeding: Internasional Conference On Humanity, Law And Sharia (Ichlash), Volume 1, Nomor 2, 2020.

Otong Rosadi dan Laurensius Arliman S, *Urgensi Pengaturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Berdasarkan Undang-Undang Sebagai State Auxiliary Bodies yang Merawat Pancasila dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, Prosiding Konferensi Nasional Hak Asasi Manusia, Kebudayaan dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Indonesia pada Masa Pandemi Covid-19: Tantangan untuk Keilmuan Hukum dan Sosial Volume 1, Universitas Pancasila, Jakarta, 2020.